

KONTESTASI ANTAR ORGANISASI SAYAP DAN HASTAKARYA PARTAI GOLKAR DALAM POSISI CALON ANGGOTA LEGISLATIF DPRD PROVINSI JAWA TIMUR 2019

Indira Putri Kirono *

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dinamika internal DPD Partai Golkar Jawa Timur akibat upaya organisasi sayap dan Hastakarya dalam menempatkan posisi kadernya pada Pemilu Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dimana informasi dan data digali dari observasi, wawancara secara mendalam, dokumentasi literatur dan perekaman, dan juga pengalaman penulis. Untuk memetakan dan memahami dinamika internal, penelitian ini Teori Kompetisi Inter-Partai Kaare Strom. Mengikuti Kaare Strom kompetisi di dalam inter-partai ditentukan oleh tiga variabel, yaitu: kontestabilitas (*contestability*), konflik kepentingan (*conflict of interest*), dan kepekaan juga adalah kinerja (*performance sensibility*) dari calon legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU sepenuhnya ditindaklanjuti yang berkuasa oleh DPD Partai Golkar. Mekanisme KPU dengan menentukan batas Daftar Calon Sementara (DCS) agar masyarakat bisa mengajukan keberatan kepada KPU. Apabila ada calon yang tidak memenuhi persyaratan maka tidak dimasukkan kedalam Daftar Calon Tetap (DCT). Selain itu strategi yang dilakukan organisasi sayap dan hastakarya dalam penempatan kader terbaik mereka adalah penempatan prosentase perkiraan jumlah kader terbaik dalam penentuan daerah pacu pemilihan dan penentuan nomor urut bagi tiap calon anggota legislative.

Kata kunci: Calon anggota legislatif, Partai Golkar, Kontestasi, Kontestabilitas, *Conflict of Interest*, *Performance Sensitivity*

Abstract

This paper aims to find out the internal dynamics of the DPD Partai Golkar Jawa Timur due to the efforts of underbow and Hastakarya in placing cadre positions in the Legislative Election of East Java DPRD in 2019. This study uses descriptive-qualitative methods where information and data are extracted from in-depth interviews, documentation and recording, and also the experience of the author. To map and understand internal dynamics, this study of the theory of Inter-Party Competition Kaare Strom. Follow Kaare Strom inter-party competition is determined by three variables, namely: contestability, conflict of interest, and performance sensitivity (*performance sensibility*) from legislative candidates. The results of this study indicate that the stages set by the KPU were fully followed up by the Golkar Party DPD. The mechanism of the KPU is to determine the Temporary Candidate List (DCS) limit so that the public can submit an objection to the KPU. If there are candidates who do not meet the requirements then they are not included in the Permanent Candidate List (DCT). In addition, the strategies carried out by wing organizations and workshops in the placement of their best cadres were the placement of the best percentage of cadres in determining the electoral districts and determining the serial number for each legislative candidate.

Key words : *Candidates for legislative members, Golkar Party, Contestation, Contestability, Conflict of Interest, Performance Sensitivity*

*Mahasiswa Program Sarjana Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Email: dirairinda8@gmail.com

Pendahuluan

Keberadaan elemen pendukung dalam partai politik merupakan instrument penunjang dalam memperoleh suara pada pemilihan umum legislatif (Pileg). Elemen bisa juga pendukung dapat berbentuk sebuah organisasi sayap partai ataupun organisasi kemasyarakatan yang menyalurkan keinginan aspirasinya kepada partai politik sebagaimana tertentu. Bentuk dukungan organisasi kemasyarakatan baik yang bersifat umum maupun sektoral terhadap sebuah kekuatan tak terkalahkan politik terlihat secara jelas pada era Orde Baru yakni ketika dibentuknya Golongan Karya (Golkar) yang kemudian menjadi kelompok kekuatan politik dominan sekali dalam pemerintahan maupun di parlemen kita. Data hasil suara dari pemilu ke pemilu dan pileg mencerminkan bahwa pilihan masyarakat Indonesia memang sebenarnya ke partai tengah, yakni Golkar dan partai-partai lain yang berada di ceruk kekuatan yang sama dengan Partai Golkar, dengan perolehan rata-rata dalam pemilu sebesar 44,96%. Sementara pada partai beraliran Islam sebesar 31,06%, dan partai nasionalis berada dalam posisi ketiga dengan perolehan rata-rata 22,568%.¹

Perolehan suara massa yang hampir setengah dari jumlah pemilih itulah yang berhasil dikelola oleh partai-partai yang sealiran dengan Partai Golkar untuk membesarkan partainya dan perolehan suaranya, seperti partai Hanura, Partai Gerindra, PKPI, Partai Demokrat, atau Partai Nasdem yang dibentuk oleh mantan elite dari Partai Golkar. Artinya di era multipartai ini, jika Partai Golkar menargetkan menjadi partai mayoritas di parlemenpun, target tersebut akan sangat realistis. Di bawah ini tabel yang menggambarkan perolehan suara Partai Golkar di parlemen.

Tabel 1.1 : Perolehan suara Partai Golkar dalam pemilihan umum 1955 – 2014.

Pemilu	Perolehan Suara Partai Islam	Perolehan Suara Partai Tengah			Perolehan Suara Partai Nasionalis		
		Golkar	Sejenis	Jumlah	PDIP	Sejenis	Jumlah

¹Reeve,David.2013. *Golkar Sejarah yang Hilang Akar Pemikiran dan Dinamika*. Jakarta. Komunitas bambu.

1955	44,1 %	-	-	-	22,32%	5,39%	27,71%
1971	27,12%	63%	0,61%	63,61%	6,93%	3,25%	10,18%
1999	36,34%	22,44%	4,07%	26,51%	33,74%	3,25%	36,99%
2004	37,56%	21,58%	13,51%	35,09%	19,82%	7,43%	27,25%
2009	29,47%	14,45%	35,50%	49,95%	14,03%	5,44%	19,47%
2014	24,81%	14,75%	34,89%	49,64%	18,95%	0%	18,95%
Rata-rata	31,06%			44,96%			22,568%

Sumber : data Rekapitulasi KPU yang sudah diedit²

Jika kita melihat tabel di atas, tampak pasang surut perolehan suara Partai Golkar dalam pemilu. Peranan elite di intra partai sangat berpengaruh dalam memperoleh suara partai. Sosok elite erat kaitannya dengan perilaku memimpin sehingga berdampak pada jalannya partai tersebut. Pada periode 1999 Akbar Tanjung sebagai ketua umum, mampu mendapatkan suara partai yang tinggi dibanding pada periode 2004 di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla yang mengalami penurunan suara yang signifikan³. Di bawah kepemimpinan Akbar Tanjung di era tersebut Golkar berhasil untuk memiliki citra baru di tengah serangan eksternal dan krisis citra. Usaha dan Upaya Akbar Tanjung inilah yang membuat beliau menjadi sosok yang legendaris bagi Partai Golkar. Lain halnya dengan kepemimpinan di DPD Golkar Jawa Timur yang pada saat itu dipimpin oleh H.M Ridwan Hisjam pada saat tahun 2001 terjadi pembakaran yang dilakukan oleh oknum yang membuat H.M Ridwan Hisjam melakukan serangkaian gerakan untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain melakukan konsolidasi dengan internal partai Golkar dan juga melakukan turun ke masyarakat dan tokoh masyarakat setempat guna untuk silaturahmi politik agar pergerakan Partai Golkar tetap aman

²KPU Jawa Timur.2018.Rekapitulasi perolehan suara pada pemilu 1955-2014.<http://kpujatim.go.id/> diakses pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pukul 13.15

³Sejarah Partai Golkar.<https://partaigolkar.or.id/sejarah> diakses pada hari Selasa tanggal 3 juli 2018 pukul 19.00

dan tidak mengalami gangguan kedepannya. Hal ini merupakan langkah besar untuk penanggulangan masalah tersebut karena tidak hanya kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur saja yang dibakar namun DPD Partai Golkar di beberapa kabupaten di Jawa Timur juga mengalami pembakaran. Lalu pada tahun 2015 ini terjadi suatu dualisme kepengurusan antara Abdurizal Bakrie dengan Agung Laksono setelah kurang lebih setahun mengalami dinamika dualisma kepengurusan ini maka diputuskan untuk menghidupkan kembali hasil dari Munas Riau yang diselenggarakan pada tahun 2009 lalu⁴. Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau⁵ ditegaskan dalam SuratKeputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar. Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya wewenang untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan.

Di era demokrasi saat ini beberapa partai di Indonesia nampak memiliki karakter unik dimana tidak tumbuh dari masyarakat dan bukan pula merupakan sebuah institusi yang awalnya adalah perantara antara anggota parlemen dengan masyarakat⁶. Terbentuknya faksi menjadi salah satu faktor keberagaman di internal partai. Kesamaan atribusi adalah salah satu pendorong terbentuknya faksi. Selain itu faksi juga terbentuk berdasarkan klasifikasi sosiologis berdasarkan struktur kelas, usia, pendidikan maupun sistem kepartaian dan sistem pemilu juga merupakan salah satu faktor terbentuknya faksi⁷. Terlebih lagi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tentunya juga ada kompetisi didalam koalisi yang akan di tentukan untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden tersebut. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik internal di dalam partai-partai politik pada era reformasi disebabkan oleh pilihan koalisi dari partai-partai politik dalam mendukung calon persiden dan/atau pemerintahan. Di internal partai-partai politik, ternyata dalam memberikan dukungan atau bergabung dalam koalisi dan/atau mendukung pemerintah atau beroposisi tersebut, memunculkan perpecahan dan faksionalisme⁸. Selain itu kompetisi didalam internal Partai Golkar sendiri juga dari adanya faksi yang terbentuk dari dualisme kepemimpinan DPP Partai

⁴Sejarah pimpinan DPD Partai Golkar Jawa Timur.2016. <https://jatim.partaigolkar.or.id/sejarah> diakses pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018 pukul 19.20 WIB

⁵Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 *Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya*

⁶ Noor, Firman.2017. LIPI. Jurnal Paenelitian Politik Vol 14 no 2. *Fenomena Post-Democracy di Indonesia : Kajian Atas Latar Belakang Karakteristik dan Dampaknya.*

⁷ Putri, Aisyah dkk.2017. LIPI.Jurnal penelitian Politik vol14 no2 : *Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Reformasi Era*

⁸ Romli, Lili. 2017. LIPI. *Koalisi dan Konflik Internal partai Politik Pada Era Reformasi.*

Golkar. Akibat yang ditimbulkan karena adanya konflik dualisme kepemimpinan partai Golkar menjelang pemilihan Presiden yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap partai Golkar, sehingga kemungkinan dapat menimbulkan berkurangnya dukungan rakyat terhadap Partai Golkar⁹. Faksionalisasi ini tidak hanya terjadi di pusat saja namun juga terjadi di seluruh daerah di Indonesia contohnya Maluku Utara. Faksi internal Partai Golkar terbentuk pada saat pemilihan kepala daerah langsung Maluku Utara pada 2007 disebabkan oleh beberapa dua faktor. Pertama, pragmatis elit Partai Golkar. Dan yang kedua, hubungan patron-klien¹⁰.

Dalam penelitian, penulis menggunakan Teori Kompetisi intra partai dari Kaare Strom (1989)¹¹. Kompetisi politik dan khususnya persaingan antar-partai, adalah konsep kunci dalam pemikiran demokrasi liberal. mengembangkan tiga konsepsi (atau dimensi) kompetisi antar-partai: (1) Contestability, (2) Conflict of Interest dan (3) Performance Sensitivity. Setiap dimensi dioperasionalkan, dan data seri waktu komparatif disajikan untuk 15 demokrasi maju, 1950-87. Kompetisi antar-partai terbukti bervariasi terutama antar negara, tetapi juga antar waktu. Dengan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan untuk setiap analisis dari fenomena-fenomena yang diamati oleh penulis secara induktif maupun deduktif. Dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi yaitu dengan "*focus group discussion*". Teknik wawancara dengan cara "*purposive*"¹² dengan cara peneliti menentukan subjek wawancara secara khusus dengan tujuan narasumber dapat menjawab masalah penelitian. Dan juga menggunakan dokumen yang didapatkan dari arsip data DPD Partai Golkar Jawa Timur.

Dinamika Internal DPD Partai Golkar Jawa Timur

Tahapan pencalegkan yang dilakukan oleh KPU Indonesia yang berlaku secara merata di seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/kota, tahapan pencalegkan dilakukan sebagai upaya agar proses pencalegkan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal. Bukan hanya proses dan tahapan pencalegkan calon anggota legislatif tetapi juga proses dan tahapan

⁹ Friscilia, Maya. 2017. Journal Universitas Riau Vol4 no2. *Dinamika Konflik Partai Golkar Tahun 2013-2015 di Riau*

¹⁰ Misrina. 2010. Journal Universitas Ternate. *Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada PILKADA 2007*.

¹¹Strom, Kaare. 1989. Sage Journal. *Journal of Theoretical Politics : Inter-party Competition in Advanced Democracies*.

¹²Horrison, Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta, Kencana Perdana Group, Jakarta.

pemilihan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara bersama-sama¹³. DPD Partai Golkar Jawa Timur telah mempunyai mekanisme dan pola rekrutmen sendiri yang dilakukan secara internal dan dengan megedepankan kader-kader terbaik Partai Golkar. Kader - kader DPD Partai Golkar Jawa Timur yang di siapkan untuk menempati posisi daftar calon sementara bukanlah kader yang didapat dari promosi yang dilayangkan pada media tertentu namun DPD Partai Golkar Jawa Timur memiliki mekanisme kaderisasi yang kuat sejak lama untuk menjaring dan mempersiapkan kadernya dalam kontestasi pemilihan calon legislatif 2019. Beberapa perubahan dalam kebijakan KPU membuat sebagian besar partai Partai Politik harus merubah strategi dalam kontestasi pemilihan legislatif 2019. Perubahan tersebut meliputi : 1). Sistem pemilu terbuka di pertahankan untuk pemilu 2019; 2). Isu presidential threshold; 3). Parlimentary Threshold; 4) metode yang di gunakan untuk menentukan caleg terpilih¹⁴. Berdasarkan hasil dan perubahan KPU tersebut maka partai-partai politik juga mencoba untuk siasati dengan berbagai strategi internal partai, menyiapkan kader-kader terbaik partai pada daerah pemilihan tertentu agar mampu meraih suara dan memenagkan kursi DPRD Provinsi. Perubahan aturan dan kebijakan yang dilakukan oleh KPU tidak berdampak positif terhadap DPD Partai Golkar Jawa Timur, oleh karena khususnya di Jawa Timur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Partai Golkar menurut itu yang membuat tidak memenuhi suara mayoritas di daerah pemilihan. hal tersebut berdampak pada kehilangan kursi DPD Partai Golkar Jawa Timur di beberapa Daerah Pemilihan. Melihat adanya fenomena perubahan sistematis oleh KPU ini juga merupakan cambuk bagi calon legislatif agar bekerja ekstra keras di daerah pilihnya agar tidak kehilangan kursi di parlemen. Karena hal ini termasuk salah satu tanggung jawab yang di emban tiap calon anggota legislatif untuk bersama-sama berkerja dalam menguatkan Partai Golkar dalam hal ini dimaksudkan mempertahankan kursi atau bahkan dapat menambah jumlah kursi di parlemen¹⁵. Selain itu adanya pola rekrutmen yang di jalankan oleh Partai Golkar dalam menentukan komposisi DCT (Daftar Calon Tetap), Tentunya pola rekrutmen calon anggota legislatif di Partai Golkar ini tercantum pada petunjuk teknis nomor: JUKNIS-I/GOLKAR/III/2018¹⁶ yang telah di tetapkan oleh Dewan pimpinan Pusat partai Golkar itu sendiri dan telah dilakukan dan dilaksanakan

¹³ Tahapan Pencalegan oleh KPUD Jawa Timur. 2018. //www.kpu.go.id diakses pada hari Jumat tanggal 29 Juni 2018 pukul 13.15

¹⁴ Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.

¹⁵ Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-...III/DPP/2018 *Tentang Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-10/DPP/Golkar/VII/2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Partai Golongan Karya*.

¹⁶ Petunjuk Teknis DPP Partai Golkar nomor: JUKNIS-I/GOLKAR/III/2018. *Tentang Orientasi Fungsionaris Partai Golkar*.

secara berkala setiap periodenya. Pola rekrutmen yang telah di jelaskan pada juknis tersebut adalah orientasi fungsionaris. Rekrutmen ini diikuti calon anggota legislatif sebagai salah satu persyaratan untuk kader dari organisasi internal Partai Golkar untuk mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon legislatif di daerah pilih masing-masing.

Pola Rekrutmen yang telah ditentukan oleh DPD Partai Golkar Jawa Timur ini yang akhirnya menimbulkan adanya kontestasi antar kader. Kontestasi adalah perebutan posisi-posisi strategis dalam partai ataupun dalam pemilihan umum legislatif, dalam pemilihan umum legislatif 2019. DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur menyiapkan 120 (seratus dua puluh) kader yang akan berkompetisi di 14 (empat belas) daerah pemilihan Jawa Timur¹⁷. Dalam pemilihan umum legislatif ada nomor-nomor urut yang dinilai strategis bagi calon anggota legislatif. Nomor urut yang dinilai strategis tersebut antara lain nomor urut 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), nomor urut yang sama dengan nomor urut partai, dan nomor urut terakhir. Adapun nomor urut satu dinilai strategis karena posisinya mudah untuk ditemukan pada lembar surat suara, lazimnya posisi tersebut diisi oleh elit partai, dan calon anggota legislatif di posisi tersebut adalah calon yang diharapkan oleh partai untuk terpilih. Sedangkan nomor urut dua dan tiga dinilai strategis karena kedua nomor urut tersebut adalah nomor urut yang lazimnya diisi oleh kader partai yang diproyeksikan untuk menjadi elit partai dimasa depan. Selain itu nomor urut terakhir juga dianggap strategis karena posisinya mudah untuk ditemukan pada lembar surat suara. Presepsi pada nomor urut tersebut seringkali menimbulkan konflik internal. Pada DPD Partai Golkar konflik yang terjadi ini juga semakin tajam karena adanya kepentingan faksi yang ingin memperkuat eksistensinya di struktural DPD Partai Golkar kedepannya.

Tidak hanya kontestabilitas, adanya konflik kepentingan juga nampak dari hasil pengamatan di FGD (*focus group discussion*) yang melibatkan antar pengurus harian Partai Golkar, bahwa adanya kontestasi antar petahana dari hastakarya SOKSI dengan petahana dari hastakarya KPPG yang berasal dari daerah pemilihan yang berbeda ketika pemilihan legislative 2014. Sebut saja Brewi yang akhirnya memutuskan untuk memilih daerah pemilihan membuat petahana yang berasal dari daerah pemilihan tersebut sebut saja Warok tergeser nomor urutnya, dikarenakan Brew diuntungkan dari sisi pembobotan karena menjabat sebagai sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan ketua Fraksi Partai Golkar. Maka Warok berharap mendapatkan mengakuan dan dukungan sehingga

¹⁷ *Ibid.*

diperjuangkan untuk tetap menempati posisi yang strategis mengingat Warok juga menjabat sebagai salah satu pengurus harisan di DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dan juga menjadi sekretaris di organisasi sayap DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Namun ketika DCT keluar malah yang terjadi Warok di tempatkan pada nomor urut 3 dan nomor urut duanya di duduki oleh orang lain yang yang dirasa unggul dari system pembobotan. Petahana ini meerasa kecewa oleh keputusan tim seleksi yang menempatkan dirinya pada nomor 3 karena melihat dirinya yang juga menjadi sekretaris organisasi sayap DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur merasa dirinya tidak diperjuangkan oleh ketua organisasinya. Pada kasus ini Nampak konflik kepentingan antar pengurus DPD Partai Golkar Jawa Timur dengan membawa hastakarya yang berbeda menunjukkan bahwa tiap-tiap hastakarya mempunyai kepentingannya masing-masing dalam kontestasi pemilihan calon anggota legislatif ini¹⁸.

Kepekaan pada performa atau kinerja calon legislatif daeri hastakarya KPPG ini juga menjadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan nomor strategis bagi calon anggota legislatif dalam konteks partai Golkar hal ini disebut pembobotan. Pembobotan ini menjadi titik pangkal pemberian nomor pada calon anggota legislatif. Kurangnya kinerja salah satu petahana di daerah pemilihannya dianggap oleh DPD kota/kabupaten daerah pemilihan tersebut menjadi perlu di pertimbangan untuk petahana ini mendapatkan nomor urut strategis. Yang mengakibatkan sebut saja Warok yang awalnya petahana di daerah pemilihan tersebut tidak mendapatkan nomor urut strategis dikarenakan kinerjanya yang dianggap kurang oleh DPD kota/kabupaten daerah pemilihan tersebut. Setelah mempertimbangkan surat yang diterima sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur dari kelima kota/kabupaten daerah pemilihan tersebut yang bersaksi dan meminta petahana daerah pemilihan tersebut agar tidak ditempatkan pada nomor urut yang strategis karena pada periode lalu, ketika dia menjabat sebagai anggota DPRD untuk dapil tersebut, yang dirasa kurang mengakomodir dan kurang perhatian kepada kelima DPD kabupaten/kota di daerah pemilihan tersebut. Menanggapi demikian tim seleksi tentunya menempatikanyang Warok di nomor urut 3 sudah tergolong mengakomodir dan memperjuangkan untuk nomor strategis itu sudah maksimal.

¹⁸Hasil wawancara dengan S.H.T (salah satu pimpinan DPD Partai Golkar Jawa Timur).di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur. Pukul 18.00 WIB

Upaya dan Strategi Organisasi Sayap dan Hastakarya

Setiap organisasi internal partai mempunyai kesempatan yang sama untuk memiliki akses dalam kontestasi pemilihan legislatif maupun lainnya, kesempatan tersebut seringkali disalah artikan oleh beberapa golongan atau faksi dalam Partai Politik. Partai Golkar dengan banyaknya organisasi internal Partai membuat persaingan semakin terasa dan bahkan cenderung saling menjatuhkan di internal partai dalam memperebutkan posisi strategis Partai, penentuan kuota calon anggota legislatif, dan dalam penentuan tim strategis *ad hoc* yang dibentuk Partai¹⁹. Menurut P.Y.M (Salah satu pimpinan dari hastakarya DPD Partai Golkar Jawa Timur), ada tiga upaya yang dilakukan sayap dan hastakarya Partai Golkar antara lain; Komposisi kader yang nantinya menjadi pertimbangan tim seleksi untuk penetapan daftar calon pilih tidak lepas kaitannya dari rekomendasi dari organisasi-organisasi yang ada di dalam Partai Golkar. Para ketua organisasi-organisasi ini pastinya memberikan formasi yang kuat dalam surat rekomendasi yang diilayangkan ke tim seleksi untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan dipenetapan daftar calon pilih. Selain komposisi kader terdapat pula penomoran yang dianggap penting bagi sebagian kader. Nomor urut merupakan masalah klasik yang sejak dahulu adalah hal yang sangat dijadikan acuan dan tolak ukur untuk keberhasilan calon legislatif. Adapun beberapa nomor strategis yang dianggap sebagai keberuntungan dan dianggap lebih menguntungkan untuk beberapa calon legislatif tertentu. Di lain sisi akses jaringan yang dimiliki oleh tiap Hastakarya dan sayap partai juga mempengaruhi upaya yang dilakukan Hastakarya dan sayap partai dalam mengakomodir kadernya untuk suksesi pemilihan legislatif 2019. Akses jaringan dalam hal ini adalah akses yang didapatkan oleh calon legislatif untuk berkoneksi dengan pihak-pihak terkait. Pemanfaatan akses jaringan ini bisa menjadikan sebuah keuntungan bagi calon anggota legislatif jika dapat memaksimalkan akses yang didupakannya. Jaringan yang dimaksud ini dapat diartikan berbagai macam sesuai kebutuhan dari calon legislatif itu sendiri.

¹⁹Hasil wawancara dengan P.Y.M (salah satu pimpinan dari Hastakarya DPD Partai Golkar Jawa Timur). Di Kediaman P.Y.M. Pukul 11.00 WIB

Kesimpulan

Tahapan pencalegkan yang telah ditetapkan oleh KPU sepenuhnya ditindak lanjuti oleh DPD Partai Golkar dalam melakukan tahapan-tahapan penjarangan calon anggota legislatif. Dinamika yang terjadi pada tahapan pencalonan anggota legislatif juga terlihat dari kader-kader yang saling berkompetisi untuk memperebutkan daerah pemilihan dan nomor urut yang dianggap strategis juga mengukur diri dari masing-masing kader sehingga kader tersebut menjadi layak berkontestasi melawan kader yang kalin atau mempunyai nilai kontestabilitas yang tinggi. Adanya konflik pementingan juga merupakan dinamika didalam pencalonan anggota legislatif ini dikarenakan Partai Golkar terdiri dari beberapa organisasi sayap dan hastakarya mengakibatkan banyak pula kepentingan yang ada sehingga menimbulkan konflik antar organisasi sayap dan hastakarya, selain itu performa dan kinerja dari masing-masing kader dari organisasi dan hastakarya juga menjadi salah satu acuan untuk berkontestasi. Kapekaan performa diperlukan agar kita merasa harus melakukan sesuatu yang lebih baik dari faksi yang lain. Kinerja kader juga menjadi salah satu tolak ukur dalam penentuan nomor urut dan daerah pemilihan.

Selain itu upaya-upaya yang telah dilakukan oleh underbow partai Golkar dalam perebutan posisi dan nomor urut strategis partai adalah menyiapkan kader-kader terbaik organisasi hastakarya untuk bertarung dalam proses seleksi dan pencalegkan. Strategi-strategi seperti penempatan presentase jumlah kader yang banyak, penentuan nomor urut strategis, akes jaringan dan pemanfaatan jaringan perlu di maksimalkan. Komposisi kader yang nantinya di tempatkan pada daerah pemilihan dan juga nomor urut yang nantinya diperoleh calon anggota legislatif merupakan salah satu strageti dari organisasi sayap dan hastakarya untuk memposisikan kader-kader terbaiknya dalam posisi strategis dalam pemilihan calon anggota legistalif. Semakin banyak kader dari organisasi sayap dan hastakarya menempati posisi yang strategis maka organisasi sayap dan hastakarya tersebut berkontestasi dengan organisasi sayap dan hastakarya yang lainnya dalam pencapaian kekuasaan diperiode selanjutnya. Selain itu pemanfaatan jaringan juga merupakan strategi dalam perebutan kekuasaan seperti untuk memperebutkan nomor urut yang strategis bagi calon anggota legislative

Daftar Pustaka

Friscilia, Maya. 2017. *Journal Universitas Riau Vol4 no2. Dinamika Konflik Partai Golkar Tahun 2013-2015 di Riau*

Horrison, Lisa, 2007. *Metodologi Penelitian Politik, Jakarta, Kencana Perdana Group, Jakarta.*

Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golongan Karya Tahun 2016 Nomor: VI/MUNASLUB/GOLKAR/2016 Tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golongan Karya.

Misrina. 2010. *Journal Universitas Ternate. Metamorfosis Faksionalisme Internal Partai Golkar di Maluku Utara pada PILKADA 2007*

Noor, Firman. 2017. *LIPI. Jurnal Paenelitian Politik Vol 14 no 2. Fenomena Post-Democracy di Indonesia : Kajian Atas Latar Belakang Karakteristik dan Dampaknya.*

Petunjuk Pelaksanaan DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-...III/DPP/2018 Tentang

Penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan Nomor Juklak-10/DPP/Golkar/VII/2017 Tentang Tata Cara Penyusunan Calon Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota Partai Golongan Karya.

Petunjuk Teknis DPP Partai Golkar nomor: JUKNIS-I/GOLKAR/III/2018. Tentang Orientasi Fungsionaris Partai Golkar.

Putri, Aisyah dkk. 2017. *LIPI. Jurnal penelitian Politik vol14 no2 : Faksi dan Konflik Internal Partai-Partai Politik di Indonesia Reformasi Era.*

Republik Indonesia. 2017. Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Romli, Lili. 2017. *LIPI. Koalisi dan Konflik Internal partai Politik Pada Era Reformasi.*

Strom, Kaare. 1989. *Sage Journal. Journal of Theoretical Politics : Inter-party Competition in Advanced Democracies.*